

**Makalah Perkembangan dan Isu-Isu Pendidikan Global**

**IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR DI INDONESIA DAN**

**HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIALAMI**



**Disusun Oleh:**

- 1. BUDI RAHARJO ( 20236013062 )**
- 2. YANDARIANI RISKI ( 20236013064 )**
- 3. AMALIA SRIWIJAYANI ( 20236013068 )**

**Semester II Kelas Banyuasin**

**Dosen : Dr. Pahlawan, M.A**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN**

**ANGKATAN 15 PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

**2024**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur selalu penulis panjatkan atas limpahan rahmad kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Makalah yang berjudul Implementasi Wajib Belajar Di Indonesia Dan Hambatan-Hambatan Yang Dialami

Makalah ini dibuat guna sebagai memenuhi tugas mata kuliah Perkembangan dan Isu-isu Pendidikan Global. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perkembangan dan Isu-isu Pendidikan Global Bapak Dr. Pahlawan, M.A. telah membimbing penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan makalah ini.

Penulis berharap makalah ini tidak hanya bermanfaat bagi kalangan akademis namun bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam makalah ini masih banyak kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Penulis hanya berharap semoga makalah ini mampu menambah pengetahuan, wawasan terutama bagi penulis dan pembacanya.

**Palembang, April 2024**

**Penulis**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN.....1

    A. Latar Belakang.....1

    B. Rumusan Masalah.....1

    C. Tujuan Penulisan .....2

BAB II PEMBAHASAN .....3

    A. Implementasi Wajib Belajar di Indonesia .....3

    B. Implementasi Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia.....4

    C. Implemetasi Progam Wajib Belajar 12 Tahun di Indonesia.....5

    D. Tujuan Pemerintah Menerapkan Wajib Belajar 12 Tahun .....7

    E. Hambatan – Hambatan yang dialami Wajib Belajar Di  
        Indonesia.....8

BAB III PENUTUP .....11

    A. Kesimpulan.....12

    B. Saran .....12

DAFTAR PUSTAKA .....13

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan sebuah usaha untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003, menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga nantinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Pendidikan yang baik dan bermutu sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas individu di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, setiap negara berlomba-lomba untuk merencanakan pendidikan yang setinggi-tingginya bagi setiap warga negaranya. Melalui pendidikan yang bermutu, maka sebuah negara akan melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dapat dilakukan dengan cara melalui pendidikan. Dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD NKRI menyatakan bahwa “Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak”, jadi disini dapat kita ketahui bahwa ada upaya dan peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia.

Upaya dan peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia dapat kita lihat dari dikeluarkannya berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah dikeluarkannya sebuah program wajib belajar. Dalam peraturan pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang program wajib belajar 9 tahun yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003.

Pada tahun 2013, pemerintah pusat telah mengeluarkan program wajib belajar 12 tahun atau sering disebut dengan program pendidikan menengah universal sebagai lanjutan dari program wajib belajar 9 tahun. Adanya program lanjutan ini dimaksudkan untuk menjaga keberhasilan dan kesinambungan dari program sebelumnya sekaligus untuk menyiapkan generasi emas di Indonesia tahun 2045. Namun pada kenyataannya, masih sering kita jumpai anak-anak yang putus sekolahnya sehingga ini membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum merata dan program tersebut belum sepenuhnya berhasil.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang dimaksud dengan wajib belajar ?
2. Bagaimana implementasi wajib belajar di Indonesia ?
3. Bagaimana implementasi program wajib belajar 12 tahun di Indonesia ?
4. Apa saja tujuan pemerintah menerapkan wajib belajar 12 tahun ?

5. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami dalam implementasi wajib belajar ?
6. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan-hambatan dalam implementasi wajib belajar ?

**C. Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui dan memahami wajib belajar di Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami implementasi wajib belajar di Indonesia.
3. Mengetahui dan memahami implementasi program wajib belajar 12 tahun di Indonesia.
4. Mengetahui dan memahami tujuan pemerintah menerapkan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengetahui dan memahami hambatan – hambatan yang dialami dalam implementasi wajib belajar di Indonesia.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Wajib Belajar Di Indonesia**

##### **1. Pengertian Wajib Belajar**

Dalam peraturan pemerintah, wajib belajar merupakan pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar bertujuan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi atau kemampuan didalam dirinya agar bisa hidup secara mandiri dalam masyarakat serta untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Wajib belajar atau bisa juga disebut dengan pendidikan wajib membentuk kepada masa pendidikan yang diwajibkan bagi semua orang dan ditetapkan oleh pemerintah. Pendidikan ini juga dapat dilakukan disekolah terdaftar maupun ditempat lainnya. Wajib sekolah atau pendidikan wajib dapat diartikan bahwa orangtua wajib menyekolahkan anaknya ke sekolah yang terpilih. Wajib belajar berfungsi untuk pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang bernilai bagi setiap warga di Indonesia.

Menurut Soedijarto wajib belajar atau Compulsary Education menetapkan pada suatu kebijakan yang mengatakan warga negara Indonesia dalam usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sekolah sampai pada jenjang tertentu serta pemerintah memberikan dukungan dan informasi sepenuhnya agar peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan dengan baik.

Salah satu program wajib belajar yaitu, wajib belajar 12 tahun yang merupakan program berkelanjutan dari program sebelumnya yaitu program wajib belajar 9 tahun, dimana program wajib belajar 12 tahun ini yang kemudian dikenal sebagai program Pendidikan Menengah Universal (PMU) dengan dasar undang-undang yang merupakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan, No 80 Tahun 2013 mengenai program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Program ini bermaksud untuk menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sekaligus untuk menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Program PMU ini merupakan strategi untuk dapat menghadapi peningkatan penduduk usia produktif di Indonesia.

Implementasi atau pelaksanaan wajib belajar diantaranya, wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal selanjutnya penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal yang dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs dan bentuk lainnya yang sederajat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa program wajib belajar merupakan salah satu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan juga pemerintah daerah, dengan bertujuan untuk memperluas pemerataan nasional serta dapat meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa Indonesia.

## **B. Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun**

Sejak pemerintahan Presiden Soekarno, Program Wajib Belajar khususnya Wajib Belajar 6 Tahun sudah diperkenalkan. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Pokok Pengajaran di Sekolah yang menjadi cikal bakal Undang-Undang Pendidikan Tahun 1984. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang Wajib Belajar 6 Tahun (Tamat SD) yang pembiayaannya ditanggung oleh negara (Dharmaningtyas, 2004). Sedangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang selanjutnya disebut Wajar Dikdas 9 Tahun, merupakan kelanjutan dari program Wajib Belajar 6 Tahun dan secara resmi dicanangkan sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. PP tersebut juga diperkuat dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Dasar normatif lain berkaitan dengan pelaksanaan Program Wajib Belajar adalah UUD 45, Pasal 31 (amandemen ke empat yang ditetapkan pada 10 Agustus 2002) Ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan bahwa: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 6 Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan di Ayat (2) dinyatakan bahwa setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) UU Sisdiknas dikemukakan secara spesifik bahwa UU tersebut hanya mengatur wajib belajar sampai tingkat dasar sembilan tahun (SD dan SMP).

Program wajib belajar 9 tahun telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 1994 dan direncanakan tuntas pada tahun 2008. Suksesnya wajib belajar 9 tahun tersebut ditandai dengan tercapainya target angka partisipasi pada tahun 2008 sebesar 95 persen. Program wajib belajar 9 tahun merupakan suatu hal yang amat penting bagi kehidupan bangsa. Sebab program itu terkait erat dengan upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan.

Pendidikan itu diperlukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi pembangunan. Pembangunan dalam bidang pendidikan melalui program wajib belajar itu diharapkan dapat mengurangi jumlah manusia Indonesia yang buta huruf. Melek huruf menjadi kunci bagaimana maju mundurnya seseorang atau kelompok orang dalam kehidupan. Melek huruf memungkinkan manusia untuk mampu mengatasi tantangan kehidupan yang dari waktu ke waktu semakin kompleks dan berat.

Pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Indonesia memiliki empat ciri utama, yaitu;

1. Dilakukan tidak melalui paksaan tetapi bersifat himbauan,
2. Tidak memiliki sanksi hukum, tetapi menekankan tanggung jawab moral dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya,
3. Tidak memiliki undang-undang khusus dalam implementasi program,
4. Keberhasilan dan kegagalan program diukur dari peningkatan partisipasi sekolah anak usia 6-15 tahun.

Dalam implementasinya, Kebijakan Wajar Dikdas 9 Tahun mengalami dinamika pasang surut. Program tersebut pada awalnya menargetkan “tuntas” pada tahun 2003/2004. Namun, akibat adanya krisis ekonomi dan krisis multi dimensi pada tahun 1998, kemudian ditunda penuntasannya menjadi tahun 2008/2009. Sebagaimana dikemukakan dalam Renstra Depdiknas 2004-2009, target penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun diantaranya adalah tercapainya APK jenjang SMP dan sederajat sebesar 95 persen pada tahun 2008 dan 98 persen pada tahun 2009.

### **C. Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun**

Pada tahun 2013, pemerintah pusat telah mengeluarkan program wajib belajar 12 tahun atau sering disebut dengan program pendidikan menengah universal sebagai lanjutan dari program wajib belajar 9 tahun. Adanya program lanjutan ini dimaksudkan untuk menjaga keberhasilan dan kesinambungan dari program sebelumnya sekaligus untuk menyiapkan generasi emas di Indonesia tahun 2045. Namun pada kenyataannya, masih sering kita jumpai anak-anak yang putus sekolahnya sehingga ini membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum merata dan program tersebut belum sepenuhnya berhasil.

Pemerintah perlu membuat strategi yang baik sehingga memberikan kemudahan layanan dan menjamin terselenggaranya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas bagi warga negaranya. Program yang dibuat oleh pemerintah sebenarnya sangat bagus jika terlaksana dengan baik. Program wajib belajar 12 tahun ini dimaksudkan agar generasi bangsa sekurang-kurangnya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga menghasilkan generasi-generasi yang bermutu dan berkualitas. Namun pada kenyataannya program ini masih belum berjalan maksimal. Seperti yang sudah penulis bahas di pendahuluan bahwa masih ada anak yang putus pendidikannya.

Dari sumber yang penulis dapatkan, putusnya pendidikan anak ditengah jalan umumnya terjadi di daerah perdesaan walaupun tidak menutup kemungkinan di daerah perkotaan juga terjadi fenomena tersebut. Faktor penyebab anak putus sekolah yaitu:

1. Faktor Keluarga Lingkungan keluarga menjadi faktor penyebab anak putus sekolah karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Rendahnya pengetahuan orang tua dan latar belakang pendidikan yang rendah menjadikan anak kurang memiliki cita-cita yang tinggi. Biasanya keluarga yang berlatar belakang seorang petani atau



pedagang mewariskan pekerjaannya kepada anak-anaknya.

2. Faktor Ekonomi Keadaan ekonomi yang rendah juga menjadi faktor penyebab putusnya pendidikan anak. Tidak jarang juga kita jumpai bahwa orang tua dengan ekonomi yang sederhana tetap mendukung anaknya untuk terus berpendidikan, namun anak yang enggan melanjutkan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa motivasi anak untuk belajar juga kurang sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan motivasi anak.
3. Keterbatasan Akses Menuju Ke Sekolah Sulitnya akses jalan dari rumah ke sekolah menjadi masalah yang serius yang dapat menjadi faktor penghambat putusnya sekolah anak. Hal ini biasa terjadi di daerah terpencil atau terpencil yang sarana prasarana jalan masih tanah dan jika musim hujan tiba, jalan tersebut susah untuk diakses. Jarak sekolah yang jauh dan tidak adanya transportasi umum yang mendukung memicu anak untuk malas bersekolah.
4. Minimnya Fasilitas Pendidikan di Suatu Daerah Pemerintah telah berupaya pemerataan pendidikan di Indonesia. Namun untuk program wajib belajar 12 tahun di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) belum bisa berjalan secara maksimal yang ditandai dengan tingginya angka putus sekolah, khususnya dari tingkat SMP menuju SMA.

Faktor-faktor tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa jika tidak ditanggulangi. Pemerintah perlu melakukan strategi atau langkah-langkah untuk menunjang keberhasilan program tersebut dan pemerataan pendidikan di daerah 3T, seperti:

- a. Pembangunan Fasilitas Sekolah Untuk melaksanakan program wajib belajar 12 tahun bisa dengan memperluas dan menambah ruangan kelas di sekolah sehingga daya tampung peserta didik dapat meningkat. Untuk wilayah 3T, pemerintah bisa menanggulangi kendala-kendala yang telah disebutkan diatas dengan mendirikan sebuah asrama sehingga diharapkan dapat mengurangi angka anak yang putus sekolah.
- b. Beasiswa Pendidikan Dengan diberikannya beasiswa dan pendidikan gratis, maka diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya.
- c. Perbaikan Akses Pendidikan Khusus untuk wilayah 3T, program wajib belajar 12 tahun bisa diimplementasikan dengan diadakannya guru keliling, perpustakaan keliling, sekolah kecil, dan lain sebagainya yang bisa menunjang keberhasilan program wajib belajar 12 tahun tersebut. Atau dapat juga dilakukan dengan menyediakan rumah dan kendaraan pintar yang menjadi sarana tempat belajar peserta didik.
- d. Sosialisasi Pendidikan Strategi atau langkah yang terakhir adalah dengan mengadakan sosialisasi pendidikan.

Untuk mendorong program wajib belajar 12 tahun dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama antara pemerintah daerah, tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang dapat terus menerus mensosialisasikan pentingnya pendidikan kepada orang tua. Melalui strategi ini diharapkan para

orang tua dapat memiliki kesadaran dan kepedulian akan pentingnya pendidikan.

Program wajib belajar 12 tahun dari pemerintah ini wajib diimplementasikan. Program ini berfungsi memperluas dan pemeratakan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi warganya. Selain itu, program ini juga berfungsi untuk mengembangkan potensi diri agar dapat hidup secara mandiri dilingkungan masyarakat dan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi sehingga memperoleh kehidupan yang lebih layak.

#### **D. Tujuan Pemerintah Menerapkan Wajib Belajar 12 Tahun Merupakan Upaya untuk Mencerdaskan Bangsa**

Program Wajib Belajar 12 Tahun juga dikenal dengan sebutan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Berdasarkan *Buku Ajar: Kapita Selekta Pendidikan Panduan di Perguruan Tinggi*, Farid Wajdi, Asmani Arif (2022:55), tujuan pemerintah menerapkan wajib belajar 12 tahun merupakan upaya untuk sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah atas.
2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*), karena kesulitan ekonomi.
3. Menarik siswa putus sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan.
4. Memberikan hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, guna menghadapi kehidupan di masa depan dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia.
5. Menjalankan pemerataan pendidikan sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (*education for all*).
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing secara global.
7. Meningkatkan angka partisipasi sekolah, sekaligus mengurangi angka putus sekolah.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun adalah sebagai berikut.

- a. Memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas.
- b. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan.
- c. Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan.
- d. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya.
- e. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel.
- f. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru.
- g. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi.
- h. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
- i. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi.
- j. Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.

Tujuan pemerintah menerapkan Wajib belajar 12 Tahun merupakan upaya untuk memberikan hak pendidikan bagi masyarakat. Program ini ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

#### **E. Hambatan-hambatan yang dialami dalam menerapkan wajib belajar di Indonesia**

Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi wajib belajar di Indonesia, di antaranya:

1. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan: terutama di daerah-daerah terpencil dan terisolasi di Indonesia, banyak sekolah yang masih minim sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, buku-buku, dan fasilitas belajar lainnya. Hal ini membuat proses belajar mengajar menjadi tidak optimal, dan mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.
2. Kurangnya pendanaan: Banyak sekolah di daerah terpencil dan terisolasi mengalami kesulitan dalam membiayai biaya operasional dan pemeliharaan sekolah, termasuk gaji guru dan tenaga pendidik. Hal ini mempengaruhi kualitas pengajaran yang diterima oleh siswa serta mengurangi motivasi guru dalam mengajar.
3. Kurangnya pelatihan dan pengembangan guru dan tenaga pendidik: untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dibutuhkan guru dan tenaga pendidik yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang memadai. Namun, salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan wajib belajar di Indonesia adalah masih banyaknya guru atau tenaga pengajar yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi yang cukup.
4. Kurangnya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan: pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, terutama bagi anak-anak, merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan wajib belajar. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya pendidikan dan enggan mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah.
5. Faktor-faktor sosial seperti kekerasan, narkoba, dan pekerjaan anak: faktor-faktor sosial ini mempengaruhi motivasi anak-anak untuk sekolah. Kondisi lingkungan yang keras, tekanan ekonomi, dan pengaruh budaya, bisa menyebabkan anak-anak tidak tertarik pada pendidikan dan lebih memilih untuk terlibat dalam aktivitas yang merugikan dirinya sendiri lainnya. Oleh karena itu, upaya-upaya perbaikan yang melakukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat perlu terus dilakukan agar implementasi wajib belajar di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan efektif.
6. Masalah Transportasi :Di beberapa daerah, aksesibilitas ke sekolah menjadi masalah serius karena jarak yang jauh dan kurangnya transportasi publik. Hal ini dapat membuat sulit bagi siswa untuk menghadiri sekolah secara teratur.

7. **Kondisi Konflik dan Krisis:** Di beberapa daerah yang terpengaruh oleh konflik atau krisis sosial, implementasi wajib belajar bisa menjadi sulit karena prioritas-prioritas yang mendesak seperti keamanan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Tentunya, mengatasi hambatan-hambatan tersebut memerlukan serangkaian upaya yang komprehensif dan terintegrasi. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. **Investasi dalam Infrastruktur Pendidikan:** Pemerintah perlu melakukan investasi yang cukup dalam infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan dan perbaikan sekolah, pengadaan fasilitas belajar yang memadai, serta penyediaan akses internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh.
2. **Program Bantuan Finansial:** Pemerintah dapat menyediakan program bantuan finansial kepada keluarga miskin agar anak-anak mereka dapat mengikuti pendidikan tanpa harus bekerja. Ini dapat berupa beasiswa, bantuan biaya sekolah, subsidi transportasi, dan bantuan pendukung lainnya.
3. **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat:** Diperlukan upaya edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, seminar, workshop, dan program-program komunitas yang memperkuat pemahaman akan manfaat pendidikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.
4. **Mengatasi Masalah Sosial dan Budaya:** Pemerintah, bersama dengan lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan budaya yang menghambat akses pendidikan. Ini bisa melibatkan program-program pendidikan informal, dialog lintas budaya, serta kampanye untuk mengubah sikap dan norma budaya yang tidak mendukung pendidikan.
5. **Peningkatan Kualitas Pendidikan:** Selain memastikan akses yang lebih luas, perlu juga diperhatikan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ini termasuk pelatihan guru yang lebih baik, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan peningkatan standar evaluasi pendidikan.

6. **Kolaborasi dengan Pihak Terkait:** Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengidentifikasi dan

mengatasi hambatan-hambatan secara bersama-sama. Ini dapat dilakukan melalui kemitraan, program-program CSR, dan inisiatif bersama lainnya.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan dalam implementasi wajib belajar di Indonesia dan meningkatkan akses serta kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Peran pemerintah sangatlah penting dalam upaya mengurangi hambatan-hambatan implementasi wajib belajar di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran serta yang dapat dilakukan oleh pemerintah:

1. **Kebijakan dan Regulasi:** Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merancang kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi wajib belajar. Hal ini mencakup pembuatan undang-undang, peraturan daerah, dan pedoman pelaksanaan yang memastikan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan.
2. **Investasi dalam Infrastruktur Pendidikan:** Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan. Ini termasuk pembangunan sekolah, pengadaan fasilitas pendukung, dan peningkatan aksesibilitas bagi siswa di daerah-daerah terpencil.
3. **Program Bantuan Finansial:** Pemerintah dapat menyediakan program bantuan finansial seperti beasiswa, bantuan biaya sekolah, dan subsidi transportasi bagi keluarga miskin atau yang kurang mampu. Ini membantu mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka.
4. **Kampanye Pendidikan Publik:** Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan publik, penerbitan materi-materi edukasi, dan kegiatan-kegiatan lain yang mempromosikan nilai-nilai pendidikan.
5. **Pengembangan Kurikulum yang Relevan:** Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan era saat ini. Kurikulum yang baik harus mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk sukses dalam kehidupan pribadi dan karier mereka.
6. **Pelatihan Guru dan Tenaga Pendidik:** Pemerintah harus memberikan pelatihan dan pengembangan profesional yang memadai bagi guru dan tenaga pendidik lainnya. Hal

ini termasuk pelatihan dalam penggunaan teknologi pendidikan, pengelolaan kelas, dan strategi pengajaran yang efektif.

7. **Monitoring dan Evaluasi:** Pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap pelaksanaan kebijakan wajib belajar. Ini termasuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul, mengevaluasi efektivitas program-program yang telah diluncurkan, dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Dengan melakukan peran serta yang efektif dalam berbagai aspek tersebut, pemerintah dapat memainkan peran yang krusial dalam mengurangi hambatan-hambatan implementasi wajib belajar dan meningkatkan akses serta kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pendidikan merupakan usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Melalui pendidikan seseorang dapat merubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Di Era sekarang ini, negara berlomba-lomba untuk merencanakan pendidikan yang setinggi-tingginya bagi setiap warga negaranya. Melalui pendidikan, negara bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermutu.

Ada banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia yaitu dengan membuat program wajib belajar 12 tahun atau sering juga disebut dengan program pendidikan menengah universal. Program ini merupakan program lanjutan dari wajib belajar 9 tahun.

Program wajib belajar 12 tahun dimaksudkan agar generasi bangsa sekurangnya tamatan sekolah menengah atas. Program ini juga dimaksudkan untuk menjaga keberhasilan dan kesinambungan dari program sebelumnya sekaligus untuk menyiapkan generasi emas di Indonesia tahun 2045.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis adalah upaya dan peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan Indonesia yang berkualitas harus terealisasi dengan baik.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas maka diperlukan pendidikan sehingga Pemerintah perlu membuat strategi yang baik sehingga memberikan kemudahan layanan dan menjamin terselenggaranya wajib belajar 12 tahun bagi warga negaranya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kusuma Wardani Welly. (2015). *Implementasi Program wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi DKI Jakarta* (Studi Kota Administrasi Jakarta Timur). *Journal Of Politic and Govenment Studies*, 1–18.
- Yuliwati, Y. (2022). Wajib Belajar 12 Tahun Dalam Realita di Wilayah Kabupaten Bogor. *Wiyata Dharma : Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 10(2), 110– 118.  
<https://doi.org/10.30738/wd.v10i2.14032>  
<https://www.kompasiana.com/sitiendang3978/65371d7a110fce23944bd4b2/implementasi-program-wajib-belajar-di-indonesia>